

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE DI SMA NEGERI 3 BULUKUMBA

Ayu Andira Akmad^{1*}, Muhammad Isa Ansari², Samsir Rahim³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to find out the implementation of the public policy of accepting new online students at SMAN 3 Bulukumba. This study used qualitative descriptive research. The results of this study showed that the implementation of the online new student admissions public policy (PPDB) at SMA Negeri 3 Bulukumba was going quite well. The communication was good, both in terms of transmission and in terms of clarity. The resources were quite adequate, both human resources, facility resources and budget resources. The disposition of the implementer was also good, committed, professional and honest, the bureaucratic structure was also good, not complicated and had clear Standard Operational Procedure.

Keywords: *policy implementation, ppdb, communication*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan publik penerimaan peserta didik baru online di SMAN 3 Bulukumba. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di SMA Negeri 3 Bulukumba berjalan cukup baik. Komunikasinya lancar baik dari segi transmisi maupun dari segi kejelasan. Sumber dayanya cukup memadai baik itu sumber daya manusia, sumber daya fasilitas maupun sumber daya anggaran. Disposisi dari implementator juga baik, komitmen, profesional dan jujur, struktur birokrasinya juga bagus tidak ribet dan memiliki SOP yang jelas.

Kata kunci: implementasi kebijakan, ppdb, komunikasi

* ayuandira@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat sekarang ini, baik disadari maupun tidak disadari telah membuat perubahan pola pikir, budaya, serta cara pandang dan juga tingkah laku masyarakat. Perkembangan yang dimaksud antara lain munculnya sebuah teknologi yaitu komputer. Keberadaan komputer telah banyak mempengaruhi sektor kehidupan manusia terutama pada sektor pendidikan. Perkembangan teknologi disisi lain juga menuntut dunia pendidikan agar dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan pendidikan yg ada di Indonesia agar tidak tertinggal dengan Negara lain.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam setiap periode selalu melakukan perkembangan yang begitu pesat. Sejalan dengan perkembangan teknologi membuat masyarakat sangat beruntung dan membutuhkan informasi yang begitu cepat, akurat, ini karena informasi adalah bagian yang begitu penting agar dapat menjalin sebuah komunikasi yang baik. Teknologi informasi semakin mudah diakses oleh siapapun dan dimanapun, karena adanya media informasi serta komunikasi yang begitu canggih. Perkembangan

teknologi dapat mendorong begitu banyak aspek agar lebih mengefisienkan sebuah pekerjaan sehingga dapat diakses menggunakan website dengan mudah.

Pendidikan adalah sebuah pondasi dari proses pembangunan atau pembentukan kualitas sumber daya manusia. Terciptanya sumber daya manusia berkualitas perlu adanya layanan pendidikan yang baik pula. Pemerintah dalam hal ini sangat berperan penting untuk menciptakan sebuah layanan pendidikan yang berkualitas agar terciptanya sumber daya manusia yang baik. Sekolah merupakan sebuah lembaga pendidikan formal yang bertugas agar menerapkan layanan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 11 ayat 1, menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam memberikan sebuah layanan serta kemudahan, dan juga menjamin agar terselenggaranya pendidikan yang berkualitas untuk setiap masyarakat tanpa adanya diskriminasi, layanan pendidikan yang sangat mengutamakan kepuasan peserta didik.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat memudahkan beberapa kegiatan manusia untuk dilakukan secara online.

Sejalan dengan hal ini penerimaan peserta didik baru sekarang ini menggunakan sistem online. Banyak sekolah-sekolah telah menerapkan sistem PPDB online, salah satunya yaitu di kabupaten Bulukumba. Penerimaan peserta didik baru khususnya di SMA Negeri Bulukumba telah diselenggarakan secara online. PPDB dengan sistem online adalah salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan serta dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan menengah dan non formal Kabupaten Bulukumba serta terhubung dengan seluruh sekolah yang berada di daerah tersebut. Pelaksanaan PPDB online SMA Negeri 3 Bulukumba dilakukan berdasarkan pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA dan SMK. Berdasarkan Peraturan dari Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tersebut, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem online dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan penerimaan peserta didik baru secara cepat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penerimaan peserta didik baru proses pelaksanaannya berlandaskan pada Permendikbud No. 44 Tahun 2019:

Objektif, berarti dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru semua harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku;

Transparan, artinya dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus bersifat terbuka serta dapat dilihat dan diketahui oleh masyarakat khususnya orang tua/wali dari calon peserta didik yang bersangkutan;

Akuntabel, dalam proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya kepada masyarakat mulai dari prosedur maupun hasilnya;

Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem online di SMA Negeri 3 Bulukumba diharapkan dapat memudahkan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu. PPDB dengan sistem online diharapkan dapat menggantikan PPDB manual yang dilaksanakan ditengah wabah Pandemi *Covid-19*, sehingga seluruh tahapan PPDB 2020 dilaksanakan secara online. Hal ini juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran *Covid-19*, mengingat semakin tingginya kasus penyebaran *Covid-19* di Indonesia, akan tetapi untuk beberapa satuan pendidikan lainnya yang berada di daerah *remote area* yang tidak bisa melaksanakan

PPDB secara online maka dapat melaksanakan PPDB dengan tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan *Covid-19*.

Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem online dapat memudahkan calon pendaftar atau calon peserta didik baru dalam melakukan pendaftaran. Calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran di mana saja dan kapan saja dengan terus memperhatikan jadwal pendaftaran. Calon peserta didik baru tidak perlu lagi datang ke sekolah dengan mengisi formulir pendaftaran, sebab calon peserta didik baru dapat melakukan pengisian formulir pendaftaran secara online kapan saja. Melihat pentingnya serta manfaat dari adanya sistem PPDB online ini, sehingga dalam penerapannya harus dilaksanakan dengan baik berdasarkan pada peraturan PPDB dengan sistem online. Oleh karena itu, program PPDB online harus didukung juga dengan perencanaan yang matang, sumber daya manusia yang bermutu baik, sarana dan prasarana yang memadai, agar pada saat proses pelaksanaannya tidak terdapat kendala atau masalah yang bisa menghambat program tersebut.

Proses pelaksanaan PPDB dengan sistem online di SMA Negeri 3 Bulukumba masih ditemukan beberapa

masalah, diantaranya pada saat proses PPDB online sedang berlangsung, jaringan internet dengan tiba-tiba melambat. Masalah tersebut berlangsung beberapa menit, akan tetapi dapat mengganggu kelancaran jalannya proses PPDB online. Melihat bahwa penggunaan teknologi juga menggunakan jaringan listrik dalam mengoperasikannya, sehingga pada saat PPDB berlangsung terkadang listrik sekolah padam. Keluhan yang lain adalah calon peserta didik baru atau orang tua wali kurang paham mengenai tahap verifikasi, kurang maksimalnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait menjadi penyebab kurang pemahannya mereka mengenai PPDB dengan sistem online.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, perlu mengetahui bagaimana implementasi kebijakan publik penerimaan peserta didik baru online di SMA Negeri 3 Bulukumba. Jelas bahwa dalam proses pelaksanaannya sistem PPDB online di SMA Negeri 3 Bulukumba belum terlaksana dengan baik dengan masih ditemukannya beberapa kendala yang ada dalam proses pelaksanaannya. Hal ini lah yang mendasari penulis dalam melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMA

Negeri 3 Bulukumba.

Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Taufik dan Israil, 2013: 136) mengartikan implementasi sebagai suatu tindakan yang dilakukan dalam keputusan sebelumnya, tindakan yang dimaksud yaitu mencakup usaha-usaha di dalam mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan untuk jangka waktu tertentu, serta dalam rangka untuk melanjutkan aktivitas dalam mencapai suatu perubahan yang besar maupun kecil yang telah ditetapkan dari keputusan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Makna implementasi menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (Abdul Wahab: 2008), mengemukakan implementasi merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi setelah suatu program dikatakan yang menjadi fokus perhatian dari implementasi kebijakan yaitu suatu kejadian dan kegiatan yang muncul setelah disahkannya aturan kebijakan Negara yang meliputi suatu usaha dalam melakukan administrasi maupun untuk menciptakan akibat sebenarnya kepada masyarakat.

Grindle (Mulyadi, 2015: 47) mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses umum dari tindakan

administratif yang dapat diteliti di tingkat program tertentu. Sedangkan Ekawati (Taufik dan Israil, 2013: 136) mengemukakan bahwa implementasi yaitu mencakup seluruh tindakan seseorang atau kelompok tertentu ataupun publik yang secara langsung untuk pencapaian tujuan dalam mengambil keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Van Meter dan Van Horn menyatakan model dasar dari implementasi kebijakan yang memiliki enam variabel yang dapat menciptakan suatu ikatan antara kebijakan dan juga pencapaian. Berikut ini merupakan enam variabel, yang dikemukakan Van Metter & van Horn, yang dapat mempengaruhi kinerja dari implementasi kebijakan publik (dalam Agustino, 2016):

Ukuran dan tujuan dari kebijakan. Maksudnya adalah kinerja dari implementasi kebijakan bisa dilihat dari tingkat keberhasilan kebijakan tersebut, jika diketahui ukuran serta tujuan dari suatu kebijakan telah sesuai dengan kondisi/kebudayaan yang ada di tingkat pelaksana kebijakan. Apabila ukuran dari kebijakan dan tujuan kebijakan telah sesuai untuk dilaksanakan pada tingkat warga, sehingga sulit untuk melaksanakan kebijakan publik sampai pada titik yang diharapkan.

Sumber daya Maksudnya adalah suatu keberhasilan dari proses implementasi kebijakan ditentukan dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia adalah salah satu sumber daya terpenting di dalam menetapkan suatu keberhasilan dari proses implementasi. Tahapan tertentu dari keseluruhan proses implementasi dituntut adanya suatu sumber daya manusia yang bermutu yang sesuai dengan pekerjaan yang tersedia dari kebijakan yang ditetapkan sebelumnya. Apabila suatu kompetensi serta kapasitas sumber daya tersebut tidak tersedia, maka kinerja dari kebijakan publik akan sulit diterapkan. Tetapi jika sumber daya lain yang dibutuhkan ialah sumber daya finansial serta sumber daya waktu, sehingga ketika sumber daya manusia yang berkompeten sudah tersedia sedangkan dana yang dibutuhkan tidak memadai, maka akan menimbulkan masalah dalam merealisasikan tujuan yang akan dicapai. Demikian juga dengan sumber daya waktu, ketika sumber daya manusia kompeten dalam bekerja dan dana yang dibutuhkan memadai, akan tetapi bermasalah dengan waktu yang sangat ketat, sehingga hal ini pula dapat menjadi salah satu penyebab tidak berhasilnya implementasi kebijakan.

Karakteristik dari Agen Pelaksana Maksudnya dari agen pelaksana yaitu menyangkut baik organisasi secara formal maupun organisasi informal yang terlibat dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik. Karakteristik agen pelaksana sangat berpengaruh karena setiap kinerja implementasi kebijakan berkaitan erat dengan para agen dari pelaksanaannya. Contohnya, implementasi kebijakan publik akan berusaha dalam merubah suatu perilaku manusia secara menyeluruh, sehingga agen pelaksana tersebut diharuskan memiliki karakteristik yang tegas, di dalam melaksanakan suatu aturan yang sesuai dengan sanksi hukum yang ditetapkan.

Berkaitan dengan sikap pelaksana dalam menerima atau menolak kinerja dari implementasi kebijakan publik. Disposisi sering kali terjadi, untuk itu kebijakan yang akan dilaksanakan bukan hasil dari formulasi masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan yang dirasakan. Akan tetapi, suatu kebijakan yang ingin di implementasikan harus dilaksanakan sesuai dari kebijakan yang diberikan dari atas yang pengambilan keputusannya tidak diketahui bahkan tidak dapat menyentuh kebutuhan maupun keinginan dari permasalahan

yang akan diselesaikan.

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam implementasi kebijakan publik. Apabila hubungan komunikasi antara pihak yang terlibat didalam proses implementasi berjalan dengan baik, maka kesalahan-kesalahan yang terjadi akan minim untuk terjadi, begitu juga sebaliknya.

Lingkungan melihat sejauh mana lingkungan yang ada di luar terlibat dalam proses terciptanya keberhasilan dari kebijakan publik yang ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud adalah sosial, ekonomi, serta politik yang mungkin tidak kondusif sehingga mengakibatkan kegagalan pelaksanaan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, cara untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal.

Menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (Subarsono:2011) terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu: bentuk kebijakan atau undang-undang, serta karakteristik dari sebuah masalah, dan faktor lingkungan. Model Implementasi menurut Mazmanian dan paul Sabatier disebut juga dengan model kerangka analisis implementasi. Dalam model ini mereka mengklasifikasikan proses implementasi kedalam tiga faktor yaitu: Pertama, Faktor Independen,

yakni mudah atau sulitnya masalah diatasi yang berkenaan dengan masalah teknis pelaksanaan, teori, keragaman objek, serta bentuk perubahan yang diinginkan. Kedua, Faktor Intervening, merupakan kemampuan dalam menstrukturkan proses implementasi dengan jelas dan konsisten, kesamaan hierarki diantara lembaga pelaksana, serta kebijakan oleh lembaga pelaksana. Ketiga, Faktor diluar kebijakan, yaitu faktor yang mempengaruhi proses implementasi berkenaan dengan kondisi ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, sikap konsisten dari pejabat pelaksana dan kualitas kepemimpinan.

Edward III berpendapat bahwa keberhasilan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor (Subarsono: 2011) adalah sebagai berikut:

Komunikasi keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh seorang implementor, seorang implementor diharuskan mengetahui target serta sasaran dari kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, harus mengetahui apa yang akan dikerjakan, sehingga dapat mengurangi bentuk penyimpangan dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

Sumber daya apabila implementor memiliki kekurangan dalam sumber daya, meskipun isi dari semua kebijakan telah disampaikan dengan sangat jelas dan konsisten oleh implementor, maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut biasanya dalam bentuk kompetensi implementor serta sumber daya finansial.

Disposisi merupakan karakter yang dimiliki oleh seorang implementor seperti kejujuran, komitmen, serta sifat yang demokratis. Apabila implementor memiliki sifat yang baik maka keberhasilan implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik, dan implementor mampu mengerjakan suatu kebijakan dengan efektif seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Akan tetapi sebaliknya jika implementor memiliki sikap yang bertolak belakang dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan tidak akan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan pembuat kebijakan.

Struktur Birokrasi Apabila struktur organisasi terlalu panjang maka birokrasi akan mengalami prosedur yang rumit dan kompleks, oleh karena itu struktur organisasi sangat berpengaruh terhadap implementasi

kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP.

Partisipasi masyarakat atau dukungan masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* bagi pelaksanaan program.

Kesuksesan Implementasi kebijakan oleh Grindle disebabkan oleh dua faktor (Subarsono: 2011), diantaranya Faktor tersebut mencakup manfaat yang diperoleh oleh target group, sejauh mana sasaran tercantum dalam isi sebuah kebijakan, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari isi kebijakan, apakah isi kebijakan telah menyatakan implementasinya dengan cermat dan apakah program yang dilaksanakan didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Marmic (dalam Yulianto: 2015) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:

Kemampuan Organisasi faktor ini menjelaskan bahwa implementasi adalah sebuah kemampuan melaksanakan tugas yang telah diberikan. Kemampuan organisasi terdapat dari tiga unsur didalamnya yaitu, 1) Kemampuan teknis, 2) Kemampuan menjalin hubungan bersama organisasi lain, 3) meningkatkan SOP dalam memberikan pelayanan.

Informasi kurangnya informasi yang didapat dan diberikan oleh suatu organisasi pelaksana dengan objek kebijakan akan berdampak negatif pada proses implementasi.

Dukungan suksesnya sebuah implementasi kebijakan, dipengaruhi oleh objek kebijakan yang selalu taat kepada pelaksana meskipun isi dari kebijakan bertentangan dengan pendapat dari mereka.

Pembagian potensi pembagian tanggung jawab yang sangat minim disesuaikan dengan pembagian tugas seperti pembatasan yang tidak jelas dan desentralisasi pelaksanaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Sma Negeri 3 Bulukumba

Tipe penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara utuh atau jelas Implementasi Kebijakan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Sma Negeri 3 Bulukumba.

Penentuan Informan dilakukan secara purposive sampling yaitu memilih langsung informan yang mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Publik Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Di Sma Negeri 3 Bulukumba

Cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang alamiah (Sugiyono, 2016). Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi sehingga memudahkan untuk memperjelas hasil pembahasan yang sebelumnya ditentukan pada pembahasan fokus dan deskripsi penelitian.

Komunikasi Dalam Organisasi

Komunikasi adalah suatu proses karena merupakan suatu seri kegiatan

yang terus-menerus, yang tidak mempunyai permulaan atau akhir dan selalu berubah-ubah. Komunikasi merupakan suatu proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan. Berkaitan dengan pelaksanaan PPDB secara online, komunikasi sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan yang ingin dicapai baik secara vertikal maupun horizontal.

Komunikasi Vertikal.

Komunikasi vertikal adalah komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas atau komunikasi dari pimpinan ke bawahan dan dari bawahan ke pimpinan. Berkaitan dengan PPDB online, komunikasi vertikal yang dimaksud yaitu komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dengan sekolah-sekolah yang menerapkan PPDB online. Salah satu sekolah yang menerapkan PPDB online di kabupaten bulukumba yaitu SMA Negeri 3 Bulukumba.

Komunikasi vertikal yang lancar sangat dibutuhkan pada saat proses pelaksanaan PPDB online karena pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proses pelaksanaan tersebut. Sistem PPDB online juga sepenuhnya dikepalai oleh

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kabupaten Bulukumba sehingga masalah yang terjadi pada proses pelaksanaan dapat dikoordinir ke pihak dinas dalam penyelesaian masalah tersebut. Untuk meminimalisir masalah-masalah yang mungkin terjadi, pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan meminta seluruh kepala sekolah untuk cepat tanggap dalam seluruh pelaksanaan PPDB online dan menjaga komunikasi dengan pihak dinas. Oleh karena itu untuk mencegah terlambatnya informasi karena alur komunikasi yang terlalu Panjang maka kepala sekolah memberikan akses untuk Admin sekolah bisa langsung berkomunikasi secara online dengan pihak dinas tanpa melalui perantara kepala sekolah maupun ketua panitia PPDB.

Komunikasi Horizontal.

Komunikasi horizontal adalah komunikasi secara mendatar, misalnya komunikasi antara karyawan dengan karyawan dan komunikasi ini sering kali berlangsung tidak formal yang berlainan dengan komunikasi vertikal yang terjadi secara formal.

Berkaitan dengan proses pelaksanaan PPDB Online, komunikasi horizontal yang dimaksud yaitu antara panitia PPDB di masing-masing sekolah. Komunikasi admin ke operator

sangatlah dibutuhkan. Admin yang bertanggung jawab sepenuhnya pada proses pelaksanaan PPDB online di sekolah membutuhkan informasi-informasi mengenai berkas pendaftar apakah tidak ada masalah yang dihadapi pada saat proses pelaksanaan.

Kerjasama Dalam Organisasi

Konflik merupakan suatu pertentangan dan ketidaksesuaian kepentingan, tujuan, dan kebutuhan dalam situasi formal, sosial, dan psikologis sehingga menjadi antagonis, ambivalen dan emosional (Soetopo, 2010). Efektif tidaknya suatu organisasi dapat diukur melalui tingkat konflik yang terjadi. Jika level konflik rendah maka tingkat keefektifan organisasi juga rendah. Sebaliknya jika konflik berada pada level tinggi, organisasi sulit dikendalikan, bahkan seluruh potensi organisasi digunakan untuk memikirkan pemecahan konflik. Hal ini akan merugikan organisasi dan gagal dalam mencapai keefektifan. Dalam menghadapi konflik yang terjadi perlunya kerjasama antara organisasi dan bagian-bagian yang bersangkutan.

Para siswa-siswa calon peserta didik itu sebagian besar telah memiliki Handphone masing-masing dan telah mengerti teknologi sehingga siswa tidak kesulitan ketika mengisi data pada

portal PPDB online tersebut. Yang menjadi masalah kemudian adalah orang tua peserta didik yang masih kurang paham dengan sistem PPDB online kadang melakukan protes kepada pihak panitia ketika anaknya dinyatakan tidak lulus ataupun anaknya lulus di sekolah lain padahal mereka menginginkan anaknya lulus di sekolah tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat mengetahui sistem PPDB yang baru diterapkan. Pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran juga kerap terjadi apalagi masyarakat yang memang jarang bersentuhan dengan teknologi. Sehingga pada loket SMA Negeri 3 Bulukumba, ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan sistem PPDB yang baru ini. Sama halnya di sekolah lain, admin yang bertugas atau pun operator memberikan pemahaman dengan jelas mengenai prosedur tersebut. Sehingga masyarakat dapat memahami prosedur pendaftaran PPDB online ini.

Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, penulis menganalisis bahwa transmisi komunikasi baik itu antara pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bulukumba dengan pihak SMA Negeri 3

Bulukumba maupun antar internal SMA Negeri 3 Bulukumba berjalan cukup baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cukup kooperatif sehingga bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah. Kepala sekolah juga mengeluarkan kebijakan yang cukup baik dengan memberikan kebebasan Koordinator PPDB online SMA Negeri 3 Bulukumba untuk langsung berkomunikasi dengan Dinas melalui aplikasi whatsapp. Komunikasi antar sesama panitia juga berjalan cukup baik, ketua panitia dapat mengatur semua panitia dengan baik apalagi semua panitia juga punya tugas masing-masing.

Dari segi kejelasan komunikasi implementasi kebijakan publik sekolah juga cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan siswa calon peserta didik baru, mengatakan bahwa proses PPDB online bisa diketahui dengan jelas karena dapat dilihat maupun diakses dimana saja. Bisa dilihat di papan pengumuman sekolah maupun di media sosial. Namun, terdapat kesalahpahaman beberapa orang tua calon peserta didik mengenai proses PPDB online yang bagi mereka itu hal yang baru. Tetapi panitia dapat memberikan pemahaman kepada mereka sehingga masalah tersebut dapat teratasi.

Sumber Daya Alam

Sumber daya fasilitas termasuk faktor yang tidak kalah penting dengan sumber daya yang lainnya dalam implementasi kebijakan public penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 3 Bulukumba, pengadaan fasilitas yang layak seperti ruangan yang nyaman, computer, jaringan internet, serta peralatan lain yang akan menunjang implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan penyelenggaraan PPDB online.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat diketahui bahwa fasilitas untuk melaksanakan PPDB online di SMA Negeri 3 Bulukumba sudah cukup memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang dimaksud cukup memadai baik itu ruangan yang dipakai oleh panitia maupun perlengkapannya. Jumlah komputer di sekolah cukup banyak di laboratorium komputer, terdapat Wifi untuk jaringan internet, serta perlengkapan yang lain. Konsumsi untuk panitia yang bekerja juga selalu tersedia.

Disposisi

Disposisi pada penelitian ini adalah tentang komitmen. Komitmen dibuktikan dengan melihat alasan implementor untuk dapat melaksanakan implementasi, tujuan/perubahan yang ingin dicapai, dan perubahan yang telah dicapai para implementor untuk implementasi kebijakan publik PPDB online di SMA Negeri 3 Bulukumba. Kebijakan PPDB online ini bertujuan untuk menerima peserta didik baru dengan cara yang adil dan dilayani dengan ramah.

Panitia PPDB online SMA Negeri 3 Bulukumba telah memperlihatkan bahwa komitmen yang dimiliki dalam menjalankan kebijakan PPDB online sudah baik. Walaupun ada beberapa panitia yang masih kurang profesional dalam menjalankan tugasnya, tetapi kekurangan itu bisa ditutupi oleh panitia yang lain.

Struktur Organisasi

Harapan dengan adanya SOP, sumber daya pengampu kebijakan mampu dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam SOP sehingga dapat menimbulkan efektivitas dan efisiensi kinerja, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin

menghindari hal yang berbelit, panjang dan kompleks.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis mendapatkan bahwa seluruh pelaksana PPDB online di SMA Negeri 3 Bulukumba telah mengikuti SOP yang benar. Jalur komunikasinya juga cukup jelas dan tidak terlalu memberatkan pihak manapun, baik itu antara panitia dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Bulukumba, antara kepala sekolah dan panitia, maupun antara masyarakat dengan panitia PPDB online SMA Negeri 3 Bulukumba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik penerimaan peserta didik baru (PPDB) online di SMA Negeri 3 Bulukumba sudah berjalan dengan baik. Mulai dari komunikasi sudah berjalan sebagaimana mestinya, baik itu dari segi transmisi maupun dari segi kejelasan. Sumber daya juga sudah memadai, kepala sekolah mengeluarkan kebijakan yang cukup baik dengan menetapkan banyak panitia PPDB serta anggaran yang cukup untuk membiayai proses PPDB online. Disposisi dari implementator kebijakan publik PPDB SMA Negeri 3 juga baik, berkomitmen,

ramah, serta bekerja secara profesional. Kemudian yang terakhir yaitu struktur birokrasi dalam PPDB online ini sudah cukup baik, tidak terlalu ribet dan jalur komunikasinya itu jelas.

Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan PPDB online masih adanya beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti halnya pada jalur prestasi, ketidaksesuaian bidang orang yang mengesahkan sertifikat dengan bidang sertifikat yang disahkan. Hal ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan antarmasyarakat pasalnya para calon pendaftar bisa saja memanipulasi sertifikat yang di bawahnya. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu sosialisasi ke masyarakat. Tidak semuanya masyarakat dapat memahami sistem PPDB secara online. terutama masyarakat yang jarang bersentuhan dengan teknologi. Sosialisasi secara lebih luas dapat dilakukan sehingga masalah yang dihadapi masyarakat dalam proses pendaftaran di portal PPDB dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alihamdan. (2017). *Pengertian Implementasi secara Umum Dan Menurut Ahli terlengkap*. Diperoleh dari <https://alihamdan.id/implementasi/>
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hariyati, Ririn. (2012). *Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Berbasis Web dan SMS Gateway di SMA Negeri 2 Klaten* (Skripsi, Universitas Negeri Yogya).
- Jannah, M., Endang E., & Burhanuddin. (2020). Implementasi Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di SMP Negeri 21 Samarinda. *eJurnal Administrasi Publik FISIP UNMUL*, 8(3) <https://scholar.google.co.id>. diakses pada 19 September 2020.
- Mulyadi, Deddy. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: In Media.
- Mutiarin, Diah. (2017). Evaluasi Penerapan SIAP-PPDB Online dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(2) <https://scholar.google.co.id>. diakses pada 19 September 2020.
- Naibaho, A. R. (2018). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara* (Skripsi, Universitas Sumatera Utara).
- Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- Setiawan, Dedi. (2016). Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Sistem Real Time Online (RTO) di Kabupaten Bantul Tahun

- Pelajaran 2015/2016. *Hanata Widya*, 5(4).
- Soetopo, Hendyat. (2010). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Rosda.
- Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. ((2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2014). *Metode Peneleitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wahab, Abdul. (2008). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin. (2012). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yulianto. (2015). *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.